

PKM Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Ekonomi Desa di Kabupaten Gresik

Moh. Khoirul Fatih¹, Nur Hakim²

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan^{1,2}
{m.khoirulfatih@iai-tabah.ac.id¹ nurhakim@iai-tabah.ac.id²}

Submission: 2023-11-14 Received: 2023-12-19 Published: 2023-12-19

Keywords:
Sekapuk Tourism
Village,
Empowerment,
Economic
Independence

Abstract. The development of the country through tourism development is currently a priority program for the central and regional governments. This is not unusual considering the country's economic condition which has experienced a decline after the Covid pandemic over the last two years. The development of tourism villages carried out by the government of Sekapuk Village, Ujungpangkah District, Gresik Regency is one part of the village government's plan to improve the community's economy. The main problem currently being faced is the lack of skills and productivity of community micro, small and medium enterprises as well as the management of PIRT and the legality of MSME products. that has been produced. Empowerment with the title development of tourism villages based on community empowerment towards economic independence aims to 1) alleviate community poverty through sustainable development of community micro, small and medium enterprises, 2) assist in analyzing the potential and realization of micro, small and medium enterprises oriented towards community empowerment towards economic independence. The approach used in this empowerment is a collaborative PAR (Participatory Action Research) approach between researchers and the community to formulate joint problems, plan and carry out joint actions to solve existing problems in a sustainable manner.

Kata Kunci
Desa Wisata
Sekapuk,
Pemberdayaan,
Kemandirian
Ekonomi

Abstrak. Pembangunan negara melalui pengembangan pariwisata saat ini menjadi program prioritas pemerintah pusat dan daerah. Hal ini bukan hal yang aneh mengingat kondisi perekonomian Tanah Air yang mengalami kemerosotan pasca pandemi Covid dalam dua tahun terakhir. Pengembangan desa wisata yang dilakukan pemerintah Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik merupakan salah satu bagian dari rencana pemerintah desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah rendahnya keterampilan dan produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah masyarakat serta pengelolaan PIRT dan legalitas produk UMKM. yang telah diproduksi. Pemberdayaan dengan judul pengembangan

desa wisata berbasis pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian ekonomi bertujuan untuk 1) mengentaskan kemiskinan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah masyarakat yang berkelanjutan, 2) membantu menganalisis potensi dan realisasi usaha mikro, kecil dan menengah berorientasi pada pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian ekonomi. Pendekatan yang digunakan dalam pemberdayaan ini adalah pendekatan kolaboratif PAR (Participatory Action Research) antara peneliti dan masyarakat untuk merumuskan permasalahan bersama, merencanakan dan melaksanakan aksi bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada secara berkelanjutan.

1 Pendahuluan

Wisata desa atau desa wisata merupakan *brand* yang sedang berkembang sekarang ini, digunakan sebagai strategi untuk menggali potensi desa yang dapat dikelola menjadi pendapatan asli desa (PAD). dikatakan oleh Fandi, Zauhar, & Hermawan bahwasannya pariwisata menjadi hal penting untuk dikembangkan oleh suatu negara melalui pemerintah daerah, karena dengan pengembangan wisata mampu menggali potensi yang dimiliki oleh suatu daerah itu sendiri (Fandi, Zauhar and Hermawan, 2012). Pembangunan pariwisata pada saat ini telah banyak dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan dan melestarikan potensi wisata yang ada di daerah tersebut. Karena sektor pariwisata pada saat ini menjadi salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar. Seperti yang dikatakan oleh Zaenuri bahwasannya sektor pariwisata menjadi sektor penting dalam kontribusinya pada pendapatan nasional, selain itu sektor wisata dapat menjadi alternatif untuk membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat (Zaenuri, 2018).

Pengembangan desa wisata dapat menjadi trobosan baru dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa dan masyarakatnya. Potensi desa yang apabila mampu dikelola secara baik dan professional akan menjadi daya tarik tersendiri dalam mengenalkan *brand* desa ke publik secara lebih luas. Namun, aspek penunjang keberhasilan desa wisata adalah masyarakatnya, seluruh warga dari berbagai elemen dapat didorong untuk bersama sama mengembangkan potensi desa menjadi wisata sebagai upaya pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian ekonomi. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan secara baik kepada masyarakat agar mereka bisa mendukung dan memahami bagaimana pengelolaan desa wisata desa. Dikatakan oleh Anggit Kurnia Prihastha dan Suswanta adanya keikutsertaan

masyarakat dalam pengembangan desa wisata dapat menciptakan iklim pariwisata yang berkelanjutan tidak hanya pengembangan wisata untuk perekonomian tapi juga melestarikan apa yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu saat ini pemerintah menggencarkan pengembangan pariwisata lokal dengan konsep desa wisata untuk memberdayakan, meningkatkan perekonomian, dan melestarikan budaya masyarakat lokal (Anggit Kurnia Prihasta dan Suswanta, 2020).

Desa Sekapuk yang terletak di Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik merupakan salah satu desa yang mampu mencapai level sejahtera mandiri yang berada di Kabupaten Gresik. Keberhasilan Desa Sekapuk tidak lepas dari keberhasilan pengembangan di sektor wisata desa. Pengembangan desa wisata Setigi mampu mendongkrak perekonomian desa dan menjadi penyumbang tertinggi pendapatan asli desa. Berdasarkan data yang didapat dari kanaldesa.com, bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Sekapuk didapatkan dari 68 persen pengelolaan wisata desa, 22 persen Dana Desa (DD), 7 persen Alokasi Dana Desa (ADD), dan sisanya 3 persen dari dana Bagi Hasil Pajak (BHP), dampak dari adanya pengelolaan desa wisata Setigi Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Sekapuk setiap tahun terus mengalami peningkatan. (Alamsyah, M. Taufiq, 2020)

Akan tetapi, problem utama yang saat ini dihadapi masyarakat desa Sekapuk Ujungpangkah Gresik adalah kurangnya keterampilan dan produktivitas usaha mikro kecil dan menengah masyarakat serta pengurusan PIRT yang masih belum banyak dimiliki oleh beberapa produk usaha mikro kecil dan menengah yang sudah dihasilkan. Pemberdayaan dengan judul pengembangan desa wisata berbasis pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian ekonomi ini bertujuan 1) mengentaskan kemiskinan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro kecil dan menengah masyarakat secara berkelanjutan, 2) pendampingan analisis potensi dan realisasi usaha mikro kecil dan menengah yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian ekonomi.

2 Metode

Pendampingan ini menggunakan pendekatan PAR *Participatory Action Research*, dijelaskan melalui diagram alur di bawah ini:



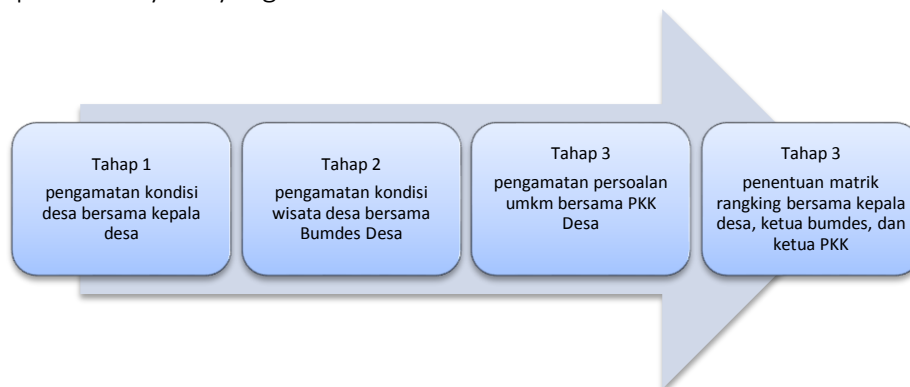
Gambar 1. Bagian Alur Kegiatan PKM

Pendekatan *Participatory Action Research* PAR digunakan sebagai metode pendampingan di masyarakat dengan menganalisis persoalan bersama masyarakat, penggunaan metode PAR dimulai dari observasi, identifikasi potensi, perencanaan aksi, aksi dan evaluasi-refleksi. Proses pemberdayaan masyarakat ini dengan melibatkan stakeholders mulai proses, aksi, hingga evaluasi dengan langkah-langkah pemberdayaan sebagai berikut:

a. Observasi

Proses observasi awal untuk mengamati dan memahami kondisi yang ada di desa Sekapuk Ujungpangkah Gresik. Pada proses ini melibatkan peneliti dan objek dampingan yang terdiri dari masyarakat serta pemerintah Desa Sekapuk. Selama proses observasi dilakukan peneliti aktif melakukan komunikasi dengan kepada desa, ketua Bumdes, Ketua PKK, dan pengelola wisata yang ada di desa sekapuk. Kepala desa memiliki peran memberikan informasi dengan potensi dan permasalahan yang masih dihadapi pengelola wisata dan penggerak ekonomi UMKM di desa Sekapuk, ketua Bumdes memiliki peran memberikan informasi pengelolaan wisata setigi yang sedang dikelola pemerintah desa, Ketua PKK memiliki peran untuk bersama sama peneliti melakukan matrik rangking guna merencanakan rencana aksi yang akan dilakukan bersama sama, observasi dilakukan bulan Oktober-November 2022. Dari proses tersebut diperoleh perencanaan aktivitas

yang hendak dilakukan secara bersama. Subyek partisipan juga bersedia mengajak teman-teman mereka yang lain. Pada proses awal pelaksanaan pendampingan dilakukan dengan cara melakukan komunikasi secara aktif dengan masyarakat dan pemerintahan desa sehingga dari komunikasi aktif tersebut akan muncul ide dan program pemberdayaan yang dilaksanakan secara bersama.



Gambar 2. diagram alur proses observasi

b. Identifikasi Potensi

Tahap ini adalah tahap untuk mengetahui potensi secara menyeluruh yang dimiliki oleh objek dampingan. Potensi tersebut meliputi potensi sosial dan potensi ekonomi. Tahap ini melibatkan subjek partisipan yang secara bersama-sama diajak untuk menggali potensi mereka dan lingkungan masing-masing. Pada tahap ini peneliti bersama masyarakat dan pemerintah desa menggali potensi lokal desa yang dapat digunakan untuk wisata desa.

c. Perencanaan Aksi

Setelah menemukan potensi yang dimiliki desa, maka kegiatan selanjutnya yakni merencanakan action. Pada tataran ini dilakukan bersama-sama seluruh masyarakat dan pemerintah desa. Setiap individu memiliki kesempatan untuk memaparkan dan membuat perencanaan seperti yang ditargetkan. Akan tetapi, pada perencanaan aksi dipilih yang prioritas untuk dilakukan sebagai wujud dari tujuan pendampingan. Pada tataran ini peneliti akan melakukan perumusan mantrik ranking atau rencana aksi yang akan dijadikan fokus

pemberdayaan dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian ekonomi.

d. Melakukan Aksi

Pada tahap ini peneliti akan melaksanakan action yang merupakan perkembangan dari hasil perencanaan aksi yang disusun secara bersama. Dalam tahap ini masing-masing anggota memiliki peran sesuai dengan kemampuan dan bidang masing masing. Peneliti bersama masyarakat dampingan melakukan aksi seperti pelatihan peningkatan keterampilan pengelolaan potensi desa dan pengolahan produk lokal menjadi produk makanan dan lain sebagainya.

e. Evaluasi dan Refleksi

Pada tahap evaluasi dilakukan melalui dua tahap yaitu evaluasi proses dan hasil. Evaluasi proses dilaksanakan pada setiap langkah saat proses pendampingan. Hal demikian untuk mengetahui sejauh mana proses tersebut sudah berlangsung sebagaimana diharapkan. Sementara evaluasi hasil merupakan evaluasi yang dilaksanakan di akhir pendampingan untuk mengetahui sejauh mana program tersebut memiliki dampak langsung terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Sekapuk. Adapun refleksi adalah upaya untuk mengambil nilai manfaat dari action dan evaluasi yang telah dilakukan bersama. Refleksi berguna untuk menentukan kegiatan kedepan atau follow up selanjutnya.

3 Hasil

a. Deskripsi Lokasi Pengabdian

Sejarah Desa Sekapuk bermula dari terpecahnya suatu desa yang berada di wilayah Tugaran (perbatasan Desa Sekapuk dengan Desa Gosari). Namun sebelum itu di wilayah Randu Inggil (Nama sebelum Sekapuk) sudah berdiri pedukuhan-pedukuhan. Sebelah Barat bernama Bendalem, sebelah timur bernama Njorang Sari, dan sebelah utara bernama Konthiy.

Setelah terpecahnya Desa Tugaran, sebagian kelompok memilih menetap di wilayah Desa Gosari dan sebagiannya menetap di wilayah Randu Inggil tepatnya di sumur tiban yang secara tidak sengaja ditemukan (Sekarang : Balai Desa Sekapuk). Sumur inilah menjadi titik awal tanda - tanda kehidupan masyarakat desa.

Seiring dengan perkembangan zaman, akhirnya masyarakat yang dulunya berada di pedukuhan-pedukuhan Randu Inggil tersebut mendekat yang dalam bahasa jawa disebut dengan istilah *Nyesek* dan berkumpul dalam bahasa jawa disebut dengan istilah *nglumpuk* di sekitar sumur tiban tersebut. Karena mendekat dan berkumpulnya masyarakat tersebut terbentuklah suatu wilayah yang padat penduduk dengan dipimpin oleh Kepala desa dan diberi nama Desa Sekapuk (Sek = nyesek/mendekat, Puk = nglumpuk/berkumpul).

Namun sebelum terjadi peristiwa tersebut di sekapuk sudah ada para pemimpin yang sudah memimpin di desa yang tidak dimasukkan kepala desa, Adapun di antaranya adalah :

- Noyopati /Kabu /Abdullah : Pemimpin Desa (Babat Alas)
- Kaskondo : Pemimpin Desa Sebelum Merdeka
- Pak Arum : Pemimpin Desa Sebelum Merdeka
- Kasmidin /Dongkol Putut : Tahun 1885 S/D 1925
- Talkah (Pak Sukandar) : Tahun 1925 S/D 1930

Kepala Desa Sekapuk secara formal mulai periode pertama sampai sekarang sebagai berikut :

- Asral /Wirodikromo : Tahun 1931 S/D 1953
- Noyo Kasdi : Tahun 1953 S/D 1965
- Sukandar : Tahun 1965 S/D 1990
- Nahwan Said : Tahun 1990 S/D 2002
- Nafi'uddin : Tahun 2003 S/D 2008
- Suwandi : Tahun 2010 S/D 2015
- Abdul Halim : Tahun 2017 S/D Sekarang (Sumber Dokumen Pemerintahan Desa Sekapuk Tahun 2021).

b. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sekapuk

BUMDes yang diberi nama BUMDes Sekapuk ini berdiri sejak tanggal 16 Maret 2009. Awal mula berdirinya BUMDes Sekapuk adalah dari UED (Usaha Ekonomi Desa). Pada tahun 1998 terdapat krisis moneter, kemudian ada program bantuan PDMDKE (Penanggulangan Dampak Moneter dan Krisis Ekonomi) sehingga lahirlah dana PDMDKE. Pada waktu itu masyarakat dikerahkan untuk kerja sosial tanpa digaji, kemudian sisa dana dikembangkan menjadi UED dan usaha-usaha yang lain yang berjalan sampai tahun 2009. Kemudian ada inisiasi dari salah satu warga yang bernama Pak Ali Sulaiman yang menginginkan agar beberapa lembaga usaha desa yang telah ada sebelumnya dapat digabungkan dalam satu wadah agar tidak terpisah-pisah. Pak Ali merupakan seseorang yang berwawasan luas. Ia mendengar info tentang BUMDes dari temannya.

Berdasarkan info tersebut Pak Ali berkeinginan untuk mendirikan BUMDes. Ia kemudian menyampaikan inisiatifnya ke Kepala Desa. Pihak Pemerintah Desa kemudian mengadakan sosialisasi tentang BUMDes ke masyarakatnya. Dari sosialisasi tersebut Pemerintah Desa melihat masyarakatnya antusias dalam menyambut rencana pendirian BUMDes tersebut, hingga kemudian perwakilan masyarakat bersama Kepala Desa dan Pemerintah Desa mengadakan Musyawarah Desa bersama dengan organisasi masyarakat lainnya seperti BPD, LSM, dan tokoh masyarakat terkait perencanaan pendirian BUMDes. Dari musyawarah tersebut kemudian didapatkan kesepakatan berupa dicanangkannya program BUMDes yang sesuai dengan PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 78 yang menyatakan bahwa BUMDes merupakan badan usaha yang dibentuk untuk meningkatkan pendapatan asli desa. BUMDes kemudian didirikan pada tahun 2009. Adapun modal awal BUMDes berasal dari bantuan berupahibah dari pemerintah dan kemudian ada penguatan modal yang sebagian berasal dari usaha-usaha desa sebelumnya seperti UED (Usaha Ekonomi Desa) dan lain-lain.

Sebagai upaya mengelola asset desa menjadi sumber pendapatan asli desa (PAD), Bumdes sekapuk tahun 2022 ini telah mengelola beberapa unit usaha di desa, di antaranya yakni sebagai berikut:

- PAM
- Multi Jasa
- Pertambangan

- Pengelolaan Sampah
- Wisata Desa Setigi dan Kebun Pak Inggih
- Perdagangan
- Agrobisnis (Wawancara dengan Abdul Halim, Kepala Desa Sekapuk, di Sekapuk, 12 Desember 2022).

c. Dapur Mbok Inggih

Dapur Mbok Inggih merupakan kumpulan dari ibu-ibu PKK Desa Sekapuk yang terbentuk tahun 2018 bersamaan dengan launching wisata setigi. Dapur Mbok Inggih memiliki fokus pada upaya pembuatan dan optimalisasi produk UMKM Masyarakat yang dapat dipasarkan di wisata desa Sekapuk yakni Wisata Setigi. Sebagaimana yang disampaikan Rif'atul Mubarakah, Ketua PKK Desa Sekapuk, bahwa potensi lokal daerah di Desa Sekapuk dapat dibidang melimpah, seperti halnya hasil pertanian warga, di antaranya Jagung, Kacang, Cabai, dan lain sebagainya, sejatinya dapat diolah menjadi produk UMKM yang memiliki nilai jual. Apalagi sekarang desa Sekapuk mengelola dua wisata desa yakni wisata setigi dan kebun pak Inggih. Hal demikian menjadi sarana untuk pemasaran produk yang dihasilkan masyarakat. Namun, di tengah semangat dari ibu-ibu PKK melalui dapur Mbok Inggih ini masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi di antaranya seperti strategi pemasaran produk, legalitas produk, dan pengurusan merk usaha. Terkadang ibu-ibu PKK merasa malas apabila produk olahannya tidak terjual. Beberapa produk UMKM yang sudah dihasilkan dari Dapur Mbok Inggih yakni, kripik lempeng, mandala, manatahan, kripik pisang, kembang gula, stik, unthuk yuyu, gapil gulung, kembang goyang, peyek kacang, samiler, kripik gloudor, pop corn, kripik bayam, carang mas, usus kentucky, kacang telur, kuping gajah, kemplangan, marning, nyeh nyean, uler-uleran, lompyah mini, kripik tempe, kripik jlunter ireng, petolo, rengginang, kripik telo, kripik pohong, pluntiran, kerupuk nasi, kerupuk ikan, kripik kentang, kripik bothe.

Desa Sekapuk dekat dengan jalan raya Deandles Surabaya-Gresik, memiliki potensi pasar yang luas. Selain itu, wilayah desa juga dikelilingi lahan pertanian warga dan tambang batu kapur. Bekas galian batu kapur yang awalnya kurang produktif, sejak kepala desa Abdul Halim

kemudian ditata dan didesain menjadi wisata desa yang diberi nama “Setigi” menampilkan beberapa destinasi wisata seperti kolam ikan, permainan perahu bebek, cafe and resto, outbond, spot photo, stand UMKM Masyarakat yang terdiri yang beberapa RT yang ada di desa Sekapuk. Seperti dikatakan Abdul Halim, Kepala Desa Sekapuk, bahwa asal usul Wisata Setigi dimulai saat jajaran pemerintah desa keliling desa melihat potensi lokasi yang sekiranya dapat dikelola pemerintah desa untuk menjadi wisata. Setigi yang dulunya tempat pembuangan sampah dan bekas galian tambang kapur, dipilih sebagai lokasi pertama yang akan didesain menjadi wisata desa pertama. Awal awal pembangunan dan pengukuran lahan terjadi gejolak, baik dengan masyarakat sendiri maupun perusahaan yang dulu mengelola lokasi tersebut. Namun, dengan semangat pemerintah desa dan tokoh masyarakat. Lokasi Pembuangan sampah dan bekas tambang kapur tersbut dibangun wisata yang sekarang dikenal dengan nama Wisata Alam Setigi (Selo Tirta Giri). Wisata ini harapannya dapat menjadi sumber pendapatan desa dan masyarakat desa Sekapuk secara berkelanjutan.

Abdul Halim juga menambahkan bahwa kelompok UMKM Dapur Mbok Inggih dikelompokkan menjadi tiga bagian, (1) 30 stand kuliner di masing-masing tempat wisata dimana setiap stand adalah stand dari masing-masing RT di Desa Sekapuk yang menaungi produk kuliner di setiap RT. (2) Pengelolaan souvenir di Desa Sekapuk yang menjadi suplier usaha souvenir di masing-masing kelompok pembuatan souvenir di Desa Sekapuk. (3) Dapur jajanan Mbok Inggih yang menjadi suplier jajanan makanan khas dan oleh-oleh wisata Desa Sekapuk dari seluruh produsen warga Sekapuk.

d. Proses Pendampingan/Pemberdayaan Peningkatan Kemandirian Ekonomi di Desa Sekapuk Ujungpangkah Gresik

1) Proses Identifikasi Masalah

Proses identifikasi masalah adalah langkah pertama dalam proses pemberdayaan/ pendampingan ini. Tim peneliti dalam hal ini melakukan beberapa tahap di antaranya yakni;

Pertama, melakukan wawancara/ interview secara langsung dengan kepala Desa Sekapuk, Ketua Bumdes Desa Sekapuk, dan Ketua PKK/Dapur Mbok Inggih Desa Sekapuk yang mengelola produk UMKM Desa. Selama proses identifikasi dilaksanakan, hal pertama yang dilakukan adalah melakukan silaturahmi dengan pemerintah desa untuk meminta izin rekomendasi melaksanakan pendampingan di wilayah Desa Sekapuk, hal ini dilakukan agar menjaga hubungan baik antara tim peneliti dengan pimpinan di desa lokasi pendampingan.

Kedua, setelah selesai *kulo nyuwun* dengan kepala desa sekapuk, tim peneliti kemudian melanjutkan gerilya dengan silaturahmi kepada Pengurus Bumdes/Pengelola Wisata di Desa Sekapuk, untuk *sharing* bersama seputar perkembangan wisata desa yang telah dikelola di desa, sejauh mana relevansi adanya wisata dengan pertumbuhan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Dari indentifikasi ini ditemukan beberapa informasi di antaranya seperti; 1) kurangnya *greget* pemuda terkhusus yang ikut serta mengelola wisata di desa sekapuk untuk aktif di medsos dan memunculkan strategi yang *up to date* guna pengembangan wisata agar terus *survive* dan mampu bersaing dengan wisata di desa lain yang juga dibangun oleh pemerintah desanya. 2). Kurangnya pengelola wisata di desa Sekapuk untuk belajar keluar desa melakukan studi banding kepada desa yang wisatanya lebih unggul dibandingkan wisata desa Sekapuk, hal ini jarang dilakukan karena pemerintah desa dan pengelola wisata desa sekapuk disibukkan dengan berbagai macam pembangunan di desa baik pembangunan SDM maupun wisata. Sebagaimana yang disampaikan Abdul Halim, Kepala Desa Sekapuk, menyampaikan bahwa persoalan gaji pengelola wisata dan pengurus Bumdes di Desa Sekapuk saya rasa sudah selesai, karena mereka rata rata menerima gaji antara 1,500.000 s.d 4.000.000 perbulannya. Akan tetapi, yang menjadi problem saat ini adalah persaingan wisata yang semakin ketat, rata rata tetangga desa memiliki program pembangunan wisata desa, karena dengan adanya wisata desa secara tidak langsung akan dapat menopang pertumbuhan ekonomi desa dan masyarakatnya.



Gambar 3. Proses identifikasi masalah

Ketiga, selesai silaturahmi dengan kepala desa dan pengelola wisata, tim peneliti kemudian melanjutkan dengan melakukan pertemuan dengan pengurus Dapur Mbok Inggih, guna mencari informasi dan *sharing* bersama tentang dinamika yang dihadapi. Dari pertemuan tersebut ditemukan beberapa permasalahan 1) tidak adanya legalitas merk maupun produk UMKM yang sudah dihasilkan didistribukan di Wisata Setigi Desa Sekapuk. 2) kurangnya pemahaman dari ibu ibu PKK/Pengurus Dapur Mbok Inggih tentang prosedur pengurusan legalitas produk UMKM. 3). Adanya anggapan bahwa legalitas produk tidak dianggap penting, bahasa sederhannya adalah yang penting jualannya laku.

2) Proses Pelatihan Fasilitas Perijinan UMKM dan Strategi Pengembangan Wisata Desa

Pada tahap ini, tim peneliti melakukan kordinasi secara intens dengan kepala desa, pengurus Dapur Mbok Inggih (Ibu Ibu PKK), dan ketua Bumdes Desa Sekapuk. Hal ini dilakukan guna mengatur bersama tentang jadwal pelaksanaan aksi yakni pelatihan fasilitasi perijinan dan strategi pengembangan wista desa Sekapuk.

Pada proses pelatihan berlangsung tim peneliti bersama narasumber dari halal center memberikan penjelasan secara mendalam dan sistematis tentang prosedur pengurusan legalitas produk UMKM yang meliputi PIRT dan sertifikasi halal. Di samping menjelaskan tentang prosedur kepengurusan, tim peneliti dan

narasumber juga menyampaikan tentang undang undang yang mengatur kepengurusan merk dan produk usaha yang dihasilkan oleh masyarakat. Dua materi di atas disampaikan guna memberikan pemahaman kepada objek pendamping agar benar benar dapat memahami dan mengaplikasikan apa yang sudah didapatkan dari pelatihan.



Gambar 4. Proses Pendampingan Perijinan UMKM dan Strategi Pengembangan Wisata Desa

Selama proses pelatihan berlangsung, tim peneliti meminta komitmen khususnya dari pengurus Dapur Mbok Inggih untuk bersama sama mengurus legalitas produk UMKM yang ada, termasuk pengurusan merk, dan prodak. Selain itu, dibuatkan group Whatsaap guna memudahkan kordinasi dan pendampingan secara berkelanjutan.

Setelah selesai menjelaskan beberapa materi penting dan fasilitasi. Para Ibu Ibu PKK kemudian praktek membuat produk UMKM nya mulai dari awal penyiapan bahan sampai pada proses pengemasan prodak. Setelah selesai praktek, tim peneliti dan narasumber pelatihan memberikan arahan tentang model pengemasan produk dan tampilan logo pada merk prodak agar lebih menarik dan estetik.

Setelah selesai melakukan beberapa tahapan pelatihan, dari pihak tim peneliti dan narasumber kemudian meminta pengurus Dapur Mbok Inggih atau Ibu Ibu PKK untuk mengirimkan foto copy

KTP dan logo merk produk untuk dijadikan sebagai awalan pengurusan izin legalitas yakni PIRT dan sertifikasi halal. Selanjutnya akan disusul dengan produk produk dan merk yang lain.

Selanjutnya, tim peneliti juga menyampaikan materi tentang proses perumusan milestone untuk strategi pengembangan wisata desa, milestone ini dibutuhkan untuk menjadi barometer dalam menjalankan program yang akan dilakukan agar lebih terstruktur dan sistematis. Selain menjelaskan prosedur perumusan milestone, tim peneliti juga menyampaikan materi tentang operasionalisasi dan optimalisasi digital marketing, memanfaatkan media sosial guna mengangkat brand dan destinasi wisata yang dimiliki desa sekapuk.

3 Pembahasan

a. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro Eko, 2002). Konsep pemberdayaan (masyarakat desa) dapat dipahami juga dengan dua cara pandang. Pertama, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (beneficiaries) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara secara given. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses Pembangunan dan pemerintahan (Sutoro Eko, 2002).

Secara konseptual pemberdayaan (empowerment), berasal dari kata *Zpower* (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai suatu yang tidak berubah atau tidak dapat diubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna (Edi, Suharto. 2005).

Terkait dengan tujuan pemberdayaan, Sulistiyani (2004) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan sertamelakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki. Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pemberdayaan masyarakat.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan dasar untuk memberikan dorongan, motivasi, dan pelatihan dalam meningkatkan kerampilan dan produktivitas usaha mikro masyarakat. Pemberdayaan dapat dilakukan dengan berorientasi pada potensi lokal yang dimiliki masyarakat namun belum dikembangkan, melalui pemberdayaan potensi tersebut kemudian ditumbuhkembangkan dan menjadi sarana meningkatkan kemandirian.

Melalui pemberdayaan, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan pemikiran yang lebih progresif tentang memanfaatkan dan mengelola potensi lokal yang dimiliki guna mewujudkan masyarakat dan terampil dan mandiri. Salah satu potensi lokal desa yang saat ini dicari dan dapat dikembagkan adalah usaha mikro kecil, menengah yang dapat sinergi dengan wisata desa.

b. Pengertian Desa Wisata

Desa wisata secara harfiah dapat dipahami bahwa di desa tersebut terdapat potensi lokal wisata karena ada nilai keontetikan dan estetika yang tersemat di dalamnya. Selain terdapat pada potensi alam yang ada, kehidupan sosial masyarakat yang masih kuat nilai tradisi dapat menjadi salah satu nilai plus dijadikan sebagai *brand* desa wisata. Dalam hemat peneliti, potensi desa wisata dapat dilihat dari tiga hal, yakni *pertama*, terdapat potensi alam yang bagus, *kedua*, kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat masih kuat dipengaruhi oleh nilai kebudayaan, *ketiga*, terdapat kunjungan wisatawan yang sering berkunjung atau melakukan *travelling* di wilayah desa.

Sesuai dengan perkembangannya desa wisata dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yakni;

- 1) Desa wisata embrio adalah desa yang mempunyai potensi wisata yang dapat ditumbuhkembangkan menjadi desa wisata dan mulai ada gerakan masyarakat untuk mengelolanya menjadi desa wisata.
- 2) Desa wisata berkembang, yakni desa wisata embrio yang sudah dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa melalui swadaya bersama masyarakat, sudah mulai melaksanakan promosi dan sudah ada wisatawan yang mulai tertarik untuk berkunjung.
- 3) Desa wisata maju merupakan desa wisata yang sudah berkembang dengan adanya kunjungan wisatawan secara aktif dan dikelola secara profesional dengan terbentuknya forum pengelola, seperti koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (Victoria S, 2017, 21).

Hadiwijoyo dalam bukunya yang berjudul *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat* mendefinisikan desa wisata sebagai kawasan pedesaan yang menawarkan suasana yang mencerminkan karakteristik pedesaan, baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial keagamaan, sosial budaya, kearifan lokal, kehidupan sehari-hari masyarakat, memiliki arsitektur bangunan yang khas dan tata ruang desa yang menyimbolkan cita-cita pemerintah desa, atau kegiatan masyarakat yang berpotensi dijadikan wisata seperti halnya kreasi masyarakat, pameran setiap tahun, wahana permainan, produk unggulan makanan dan minuman hasil produksi masyarakat (Hadiwijoyo, 2012, 68).

Sementara itu, untuk mewujudkan desa wisata perlu dipahami kriterianya antara lain adalah: (1) Adanya akses fisik (fasilitas) dan pemasaran (2) Tersedianya fasilitas umum (3) Adanya antusiasme dan motivasi masyarakat (4) Memiliki potensi kemitraan (5) Adanya obyek atau destinasi dan daya tarik: desa memiliki destinasi wisata dan lokasinya berdekatan dengan obyek wisata yang sudah terkenal agar dapat masuk dalam paket perjalanan. Selain itu pengembangan desa wisata juga harus memperhatikan prinsip perencanaan desa wisata antara lain: (1) Memperhatikan karakteristik lingkungan setempat; (2) Meminimalisir dampak negatif yang akan ditimbulkan di kawasan tersebut; (3) bahan-bahan yang digunakan ramah lingkungan dan dapat didaur ulang; (4) Materi yang digunakan sesuai dengan keadaan lingkungan setempat; (5) Melibatkan masyarakat setempat atau lokal dalam pengembangan baik secara langsung maupun tidak langsung (Arida & Pujani, 2017, 9).

Desa wisata merupakan sarana menciptakan *brand* desa yang nantinya dapat bermanfaat bagi generasi muda desa, apabila pemerintah bersama masyarakat mampu mengalisis potensi lokal desa yang meliputi sosial ekonomi, sosial keagamaan, sosial budaya dan kehidupan masyarakat sehari-hari yang dinilai unik dan menarik menjadi destinasi wisata nantinya akan dapat membuka lapangan kerja baru bagi warga setempat dan memanfaatkan wisata desa sebagai sumber pendapatan. Dengan cara demikian, potensi desa akan berdaya guna dalam mendukung kemandirian ekonomi masyarakat.

Selanjutnya, dalam proses pendampingan yang dilakukan di desa Sekapuk diharapkan tidak hanya dapat menerapkan pengalamannya untuk jadi pedoman pembelajaran (*learning by doing*), namun juga akan mampu menciptakan kreativitas baru untuk peningkatan ekonomi mereka. Proses penemuan ilmu (*discovery learning*) yang dinamis sangat diharapkan dalam menyongsong perubahan yang diinginkan, (Mansour Fakhri, 2004, 17), sehingga target yang muncul adalah adanya semangat para penggerak ibu-ibu PKK untuk mengurus legalitas setiap produk yang telah dihasilkan.

Dari kajian teori di atas dapat dipahami bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu kegiatan meningkatkan keterampilan dan produktivitas usaha sebagai sarana kemandirian perekonomian keluarga serta mendorong agar memiliki semangat untuk terus tumbuh dan bekerja secara kolektif untuk mewujudkan terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa. Dari kegiatan pemberdayaan juga akan dapat memotivasi dan membangkitkan kesadaran masyarakat agar ikut serta terlibat dalam mengelola semua potensi yang ada secara berkelanjutan.

c. Dinamika Keilmuan

Pemberdayaan memiliki arti proses menuju berdaya. Pengertian “proses” menunjukkan pada serangkaian langkah-langkah yang dilakukan oleh pendamping secara bertahap untuk mengubah masyarakat yang didampingi menjadi berdaya serta memiliki kompetensi. Dalam pengertian lain dijelaskan bahwa pemberdayaan adalah memberikan pemahaman, peluang, sumber daya dan pelatihan *skill* kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menentukan rencana kedepan atau masterplan bagi perkembangan desa kedepan. Tri Winarni dalam bukunya *Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif Dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat* menguraikan, bahwa inti dari pemberdayaan adalah pengembangan memperkuat potensi atau kemampuan, dan terciptanya kemandirian objek setelah selesai pendampingan.

Pendampingan kepada masyarakat dengan judul “Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Ekonomi Di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik” menitik beratkan pada upaya peningkatan potensi dan keterampilan dari pelaku UMKM dan pengelola wisata desa Sekapuk agar lebih memiliki kemampuan dalam membaca peluang dan potensi yang dapat digarap untuk menunjang kemandirian ekonomi desa dan masyarakat.

Selama proses pendampingan dilakukan tentu tidak terlepas dari dinamika yang ada, baik yang baru muncul maupun yang sudah ada lama dan belum bisa diselesaikan sampai sekarang. Berbagai macam dinamika tersebut menjadi point penting bagi tim peneliti yang kemudian melaksanakan *sharing* bersama masyarakat untuk bersama sama menyelesaikan dinamika yang selama ini dialami, pendekatan partisipatoris digunakan sebagai metode pendekatan agar tim peneliti dapat membentuk sikap keterbukaan dan kepercayaan, berbaur dan interaksi secara baik dengan masyarakat, sehingga dapat menyelesaikan segala bentuk dinamika dan persoalan bersama sama. Tujuan dari pemberdayaan ini adalah belajar bersama-sama antara fasilitator dengan masyarakat binaan secara aktif, hal tersebut dilakukan sebagai upaya mengenali realitas sosial yang dihadapi masyarakat.

Selanjutnya, selama proses pendampingan pada masyarakat di desa Sekapuk diterapkan pendekatan partisipasi aktif yang terakomodir, yakni suatu pendekatan yang digunakan untuk mengajak anggota binaan untuk selalu berpartisipasi aktif sesuai dengan jadwal pendampingan yang disepakati bersama. Unsur yang ada pada pendekatan partisipati aktif terakomodir adalah terpenuhinya keinginan anggota binaan dalam meningkatkan kompetensi untuk menciptakan inovasi baru dalam menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Titik fokus pada pendampingan ini adalah ,menciptakan kesadaran dari para penggerak UMKM dan pengelola wisata desa agar bisa

berlajar secara aktif melalui teknologi informasi maupun diskusi bersama pengelola wisata desa yang dinilai lebih berkembang, selain itu juga berusaha menciptakan kesadaran tentang pentingnya pengurusan legalitas setiap produk yang ada di Kelompok PKK Dapur Mbok Inggi Desa Sekapuk. Kesadaran semacam ini sangat dibutuhkan untuk meminimalisir kesenjangan antara masyarakat dengan pemerintah desa, apabila hubungan pemerintah desa dengan masyarakatnya terjalin baik maka tidak sulit mengembangkan desa yang berorientasi pada upaya kemandirian ekonomi. Selain itu, pengurus Dapur Mbok Inggih dan pengelola wisata juga akan memiliki semangat secara kolektif untuk bersama sama melakukan sesuatu yang dianggap peluh guna pengembangan desa sekapuk.

Setelah proses pemberdayaan dan pendampingan selesai dilakukan Buah dari pemberdayaan masyarakat adalah kesadaran akan bakat atau kemampuan, kemandirian, produktivitas, dan komitmen kolektif. Kesadaran akan kemampuan yang terpendam, keterampilan, kemandirian, dan komitmen merupakan *human assets* yang dapat dioptimalisasikan dalam proses penataan desa. Pemberdayaan masyarakat akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengarahkan, mengendalikan, membentuk dan mengelola hidupnya. Indikator pemberdayaan meliputi memahami masalah, menilai tujuan hidup, membentuk strategi, mengelola sumberdaya untuk berbuat dan bertindak ke arah masyarakat yang lebih kompeten dan berdaya.

d. Pendampingan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Ekonomi di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik

Pemberdayaan dipahami sebagai gerakan perubahan, perubahan yang tidak mampu menjadi mampu, dari yang tidak paham menjadi paham, dari yang tidak berdaya menjadi lebih berdaya, dan yang paling penting dalam proses pemberdayaan adalah terciptanya kesadaran baru tentang pentingnya melakukan sesuatu yang awalnya dianggap tidak penting, akan tetapi setelah dilakukan kajian dan pendampingan

sesuatu yang selama ini dianggap *sepeleh* tersebut ternyata memiliki manfaat dan relevansi dengan tumbuhkembangnya kegiatan usaha yang dilakukan secara kolektif.

Dalam proses pendampingan/pemberdayaan tentu tidak berjalan lancar, sesuatu yang sudah diagendakan oleh tim pendamping seringkali tidak sinkron dengan kondisi sosial masyarakat yang didampingi. Akan tetapi, melalui aplikasi pendekatan partisipatoris yang sering digunakan menjadi metode untuk mengukur kegiatan pendampingan agar berjalan secara sistematis dan terstruktur.

Proses yang pertama dilakukan adalah identifikasi masalah, yang nantinya diangkat menjadi fokus utama pendampingan. Identifikasi masalah ini dilakukan agar proses pendampingan sesuai dengan persoalan dan kondisi sosial di masyarakat. Pemerintah desa Sekapuk melalui Dapur Mbok Inggih dan Bumdes-nya memiliki semangat tinggi dalam optimalisasi potensi di desa yang adapat dikembangkan menjadi sarana peningkatan pendapatan desa dan masyarakat. Akan tetapi, semangat saja tidak cukup, diperlukan pemikiran, gagasan, dan strategi yang sistematis agar proses kerja berjalan sesuai dengan program kerja yang dicanangkan oleh kepala Desa. Dari sinilah, dapat diambil pemahaman bahwa sinergi dan kolaborasi yang baik akan menjadi kunci suksesnya realisasi setiap program yang ada di desa. Diskusi bersama, *sharing* pengalaman, review program kerja secara berskala, dan tentunya pemikiran visioner rasional yang ketika disampaikan dapat dilakukan secara bersama sama.

Pemberdayaan ini mencakup tiga aspek. *Pertama*, berupaya mewujudkan kesadaran tentang hal hal yang inovatif, *kedua*, agar masyarakat memiliki kemampuan mengidentifikasi persoalan yang sering kali muncul selama proses kegiatan UMKM dan pengelolaan wisata desa, *ketiga*, menggerakkan potensi baik Sumber Daya Manusia maupun alam agar menjadikan Dapur Mbok Inggih dan Wisata Desa Sekapuk sebagai pioner pertumbuhan UMKM di desa.

Beberapa kegiatan yang dilakukan selama pendampingan, para pelaku UMKM dan pengelola wisata desa Sekapuk khususnya wisata "Setigi" berdialog dan *sharing* bersama tim peneliti di dalam area

wisata Setigi. Mereka cerita dan menyampaikan secara detail tentang problem serta dinamika yang dialami selama ini, termasuk ketidak mampuan mengurus legalitas produk UMKM yang sebetulnya sudah ada banyak, namun keterbatasan kami menjadi kendala tidak adanya legalitas baik merk maupun izin sertifikasi Halal dan PIRT produk. Dari informasi ini tim peneliti kemudian menitik beratkan pada upaya membantu dan mendampingi perkembangan UMKM melalui beberapa kegiatan seperti pelatihan, fasilitasi pengurusan legalitas produk, pembuatan matrik rangking, dan menciptakan strategi baru yang kiranya dapat digunakan sebagai upaya sarana menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di desa Sekapuk Ujungpangkah Gresik merupakan dasar untuk memberikan dorongan, motivasi, dan pelatihan dalam meningkatkan kerampilan dan produktivitas usaha mikro masyarakat serta fasilitas perijinan produk usaha yang ada. Pemberdayaan dapat dilakukan dengan berorientasi pada potensi lokal yang dimiliki masyarakat namun belum dikembangkan, melalui pemberdayaan potensi tersebut kemudian ditumbuhkembangkan dan menjadi sarana meningkatkan kemandirian. Melalui pemberdayaan, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan pemikiran yang lebih progresif tentang memanfaatkan dan mengelola potensi lokal yang dimiliki guna mewujudkan masyarakat dan terampil dan mandiri. Salah satu potensi lokal desa yang saat ini dicari dan dapat dikembangkan adalah usaha mikro kecil, menengah yang dapat sinergi dengan wisata desa.

5 Kesimpulan

Perkembangan wisata desa dan UMKM membutuhkan pendampingan dari akademisi universitas sebagai sarana sinergi kolaborasi membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya peningkatan produktivitas dan keterampilan masyarakat dalam rangka menuju kemandirian ekonomi. Setelah dilakukan pendampingan, pemerintah desa Sekapuk Ujungpangkah Gresik memiliki kesadaran bahwa keberadaan wisata desa dan UMKM

Dapur Mbok Inggih merupakan asset penting desa sebagai sarana meningkatkan ekonomi masyarakat. Melalui program pengembangan desa wisata dan UMKM Dapur Mbok Inggi seyogyanya dapat menjadi solusi pengentasan kemiskinan masyarakat di tingkat desa. Pengurus, pengelola wisata Setigi, dan Anggota Dapur Mbok Inggih menyadari bahwa model pengemasan dan tampilan produk UMKM yang sudah ada dinilai kurang ideal, karena belum memiliki legalitas produk. Sehingga dengan semangat bersama untuk menyelesaikan legalitas produk UMKM akan menjadi solusi dan harapan untuk tumbuhkembangnya UMKM di desa Sekapuk. Kemampuan membaca peluang dan membuat perencanaan serta strategi yang inovatif juga akan mempengaruhi eksistensi dan perkembangan wisata yang ada di Desa Sekapuk.

6 Pengakuan

Penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya disampaikan kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yang telah mendukung atas terselenggarakannya kegiatan ini. Selain itu ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah (IAI TABAH) Lamongan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, Kelompok UMKM Dapur Bu Inggih Desa Sekapuk dan seluruh masyarakat Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik yang telah terlibat aktif selama kegiatan dilaksanakan.

7 Referensi

- Arida & Pujani. (2017). *Kajian Penyusunan Kriteria Kriteria Desa Wisata Sebagai Instrumen Dasar Pengembangan Desawisata*, Jurnal Analisis Pariwisata.
- Agung Istri Andriyani, Edhi Martono, dan Muhamad. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah: Studi di Desa Wisata Penglipuran Bali*, Jurnal Ketahanan Nasional Volume 23 Nomor 1 April.
- Anggit Kurnia Prihasta dan Suswanta. (2022). *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Kaki Langit Padukuhan Mangunan*, Jurnal Jumpa Volume 7, Nomor 1, Juli.

- Dya Istianti. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Di Desa Sukowening, *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat* Januari 2020 Volume 2 Nomor 1.
- Edi, Suharto. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Fandi, K., Zauhar, S. and Hermawan. (2012). Kemitraan Pengelolaan Sektor Pariwisata, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(1).
- Hadiwijoyo. (2012). *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Haniva Rohmatul Jannah & Ida Ayu Suryasi, (2019). *Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Masyarakat di Desa Mas Ubud*, *Jurnal Destinasi Pariwisata* Volume 7 Nomor 1.
- Mansour Fakhri, Dkk, (2004). *Pendidikan Populer Panduan Pendidikan Metode Kritis Partisipatoris*, Yogyakarta : Insist Press.
- SumberDokumen Pemerintahan Desa Sekapuk Tahun 2021.*
- Sutoro Eko, (2002), *Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, Desember 2002.*
- Suyono , Haryono. (2006). *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Khananta, *Pustaka LP3ES Indonesia*.
- Soetomo. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar
- Wawancara dengan Abdul Halim, Kepala Desa Sekapuk.
- Wawancara dengan Rif'atul Mubarakah, Ketua PKK Desa Sekapuk.
- Widjajanti. (2019). *Model Pemberdayaan Masyarakat*,. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol 12, Juni 2011, hlm 16. Diakses Juli 2019.
- Victoria S, dkk. (2017). *Panduan Pengembangan Desa Wisata Hijau*, Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM RI.
- Sulistiyani, Ambar Teguh, (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* , Yogyakarta: Gava Media.
- Sutikno. (2010). *Pemilihan Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat dengan Pendekatan Sistem*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol 11, Juni.
- Zaenuri, M. (2018). *Tata Kelola Pariwisata Bencana Berbasis Collaborative Governance, Konsep, Analisis, dan Pemodelan (1st ed.)*. Yogyakarta: Explore.